Model Strategi Pemberdayaan Kelompok Usaha Wanita Tangguh (KUWATAN) Program Keluarga Harapan (PKH) Di Soreang Kabupaten Bandung

Tuti Kartika*[1], Dwi Yuliani[2], Aribowo[3], Milly Mildawati[4], Bambang Rustanto[5]

[1,2,3,4,5] Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Indonesia
*e-mail: rustantostks@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan menempatkan perempuan pada posisi paling rentan secara sosial dan ekonomi. Data Dari Dinas Sosial (2023) Kabupaten Bandung, jumlah perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) mencapai 268,02 ribu jiwa (7,36%), dengan 7,25% rumah tangga dikepalai perempuan yang sebagian besar 55% nya adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program keluarga Harapan (PKH). Meskipun program keluarga harapan (PKH) berkontribusi menurunkan angka kemiskinan regional, tantangan terbesar adalah mendorong keluarga penerima manfaat (KPM) keluar dari ketergantungan bantuan melalui graduasi sejahtera mandiri. Pengabdian masyarakat oleh pusat pengabdian masyarakat (PPM) Poltekesos Bandung ini bertujuan mengimplementasikan Model Strategi Pemberdyaan kelompok usaha wanita tangguh (KUWATAN) sebanyak 25 orang KPM PKH dengan Pendampingan 5 Orang Dosen Poltekesos Bandung. Waktu pelaksanaan kegiatan PPM selama periode Maret sd Oktober 2024. Metode yang digunakan adalah pengorganisasian masyarakat (community organization) berbasis feminist social work melalui enam tahapan makro pekerjaan sosial: persiapan sosial, membangun relasi, asesmen partisipatif, penyusunan rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, dan validasi/evaluasi. Sasarannya adalah KPM-PKH potensial yang memiliki rintisan usaha dan pendamping sosial PKH. Hasilnya, KUWATAN terbentuk sebagai ruang belajar bersama (learning each other); melalui diagram venn, KPM -PKH mampu memetakan dan memperluas jaringan usaha, termasuk kemitraan dengan sektor swasta dan dinas terkait. Evaluasi partisipatif menunjukkan peningkatan kapasitas ekonomi, kemandirian sosial, dan posisi tawar (bargaining position) perempuan, seiring pergeseran dari the hidden power menjadi the visible power. Model KUWATA N efektif sebagai strategi akselerasi graduasi mandiri sebanyak 15 KPM PKH yang menerima pendampingan PPM dari Poltekesos Bandung.

***Kata kunci**: Feminist Social Work, Graduasi Mandiri, Jaringan Usaha, KPM PKH KUWATAN*

Abstract

Poverty places women in the most socially and economically vulnerable positions. Data from the Bandung Regency Social Office (2023) indicates that the number of women vulnerable to social and economic risks (perempuan rawan sosial ekonomi - PRSE) reached 268.02 thousand people (7.36%), with 7.25% of households headed by women, of which the majority (55%) are Beneficiary Families (Keluarga Penerima Manfaat - KPM) of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan - PKH). Although the PKH program contributes to reducing regional poverty rates, the primary challenge remains encouraging beneficiary families to break free from assistance dependency through independent graduation (graduasi sejahtera mandiri). This community service program conducted by the Center for Community Service (PPM) of Poltekesos Bandung aimed to implement the Empowerment Strategy Model for the Resilient Women's Business Group (KUWATAN), involving 25 PKH KPM members mentored by 5 lecturers from Poltekesos Bandung. The implementation period spanned from March to October 2024. The method employed was community organization based on feminist social work, structured through six macro social work stages: social preparation, relationship building, participatory assessment, intervention planning, intervention implementation, and validation/evaluation. The target participants were potential PKH KPMs with nascent business startups and PKH social facilitators. The results show that KUWATAN was successfully established as a shared learning space (learning from each other); through Venn diagrams, PKH KPMs were able to map and expand their business networks, including establishing partnerships with the private sector and relevant government agencies. Participatory evaluations demonstrated an enhancement in women's economic capacity, social independence, and bargaining power, marked by a shift from "hidden power" to "visible power." The KUWATAN model proved effective as an acceleration strategy for the independent graduation of 15 PKH KPM members who received community service mentoring from Poltekesos Bandung.

***Keywords:** Feminist Social Work, Independent Graduation, Business Network, PKH KPM, KUWATAN*

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan bukanlah sebuah fenomena sosial yang netral gender. Ketika suatu komunitas atau keluarga terperangkap di dalam jerat kemiskinan struktural, kaum perempuan selalu menjadi kelompok yang merasakan dampak paling dalam, berlapis, dan berkepanjangan. Di tingkat domestik, peran jender tradisional membebankan tanggung jawab pengelolaan rumah tangga sepenuhnya kepada perempuan. Mereka dituntut untuk mengelola keterbatasan sumber daya finansial yang sangat minim demi memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota keluarga, mulai dari pangan, kesehatan, hingga pendidikan anak. Kondisi sosiologis ini menempatkan perempuan pada posisi yang sangat rentan, baik secara sosial maupun ekonomi, karena mereka menanggung beban psikologis dan fisik yang tidak sebanding dengan akses kontrol mereka terhadap sumber daya ekonomi.

Di Kabupaten Bandung, fenomena kemiskinan yang mengakar pada perempuan ini termanifestasikan secara nyata melalui tingginya jumlah perempuan rawan sosial ekonomi atau yang biasa disebut PRSE. Jika merujuk pada data makro yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (tahun 2023,2024 dan 2025), persentase penduduk miskin secara umum di Kabupaten Bandung sebenarnya menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten dan menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir. Angka kemiskinan makro daerah ini tercatat sebesar 6,40 persen pada tahun 2023, kemudian berhasil ditekan menjadi 6,19 persen pada tahun 2024, hingga akhirnya menyentuh angka 6,04 persen pada tahun 2025. Secara sepintas, penurunan yang stabil ini mengindikasikan bahwa berbagai program jaring pengaman sosial berskala makro yang digulirkan pemerintah—khususnya program keluarga harapan—telah berjalan di jalur yang benar dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

Namun demikian, indikator keberhasilan makro tersebut sering kali menyembunyikan realitas struktural yang jauh lebih kompleks dan timpang di tingkat akar rumput. Data Dinas Sosial Kabupaten Bandung (tahun 2023) kemiskinan kenyataannya masih didominasi secara masif oleh kelompok perempuan rawan sosial ekonomi. Jumlah PRSE di daerah ini masih berada pada angka yang sangat mengkhawatirkan, yakni mencapai 268.020 jiwa atau setara dengan 7,36 persen dari total keseluruhan penduduk. Situasi ini menjadi jauh lebih memprihatinkan apabila melihat fakta bahwa terdapat sekitar 7,25 persen rumah tangga di Kabupaten Bandung yang dikepalai oleh perempuan sebagai tulang punggung tunggal, umumnya diakibatkan oleh perceraian atau karena ditinggal mati oleh pasangan hidup mereka.

Kondisi ketergantungan ekonomi ini tercermin jelas dalam data jaminan sosial. Data terpadu kesejahteraan sosial hingga bulan Desember 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 102.377 keluarga penerima manfaat sesuai data dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung (tahun 2024) masih menggantungkan kelangsungan hidup mereka pada bantuan bersyarat PKH. Di sisi lain, Dinas Sosial Kabupaten Bandung (tahun 2024) mencatat akumulasi angka graduasi peserta PKH hingga akhir tahun 2024 baru menyentuh angka sekitar 1.000 KPM. Angka kelulusan yang sangat minim ini mencakup graduasi alamiah, yang terjadi semata-mata karena habisnya komponen kepesertaan seperti anak yang telah lulus sekolah atau tidak adanya lagi balita, serta sebagian kecil graduasi sejahtera mandiri. Kecilnya rasio graduasi mandiri ini jika dibandingkan dengan total ratusan ribu penerima manfaat mempertegas adanya fenomena ketergantungan bantuan atau *welfare dependency* yang kronis dan sulit diputus.

Riset pekerjaan sosial makro yang dilakukan oleh Politeknik Kesejahteraan Sosial (2024) di wilayah transisi pinggir kota Kabupaten Bandung, seperti di Kecamatan Pasirjambu dan Soreang, mengungkap tiga faktor utama yang saling bertumpuk dalam melanggengkan kemiskinan struktural pada perempuan. Faktor pertama adalah beban domestik ganda. Kaum perempuan dari keluarga miskin di wilayah pedesaan dan pinggiran kota dituntut untuk mencari nafkah tambahan demi menyambung hidup keluarga, namun di saat yang sama mereka tidak bisa melepaskan tanggung jawab pengasuhan anak dan pengurusan urusan domestik. Waktu harian mereka tersita habis oleh rutinitas fisik yang melelahkan, sehingga membatasi ruang gerak, energi, dan kesempatan mereka untuk mengakses pendidikan nonformal, pelatihan peningkatan kapasitas, maupun kelembagaan ekonomi yang lebih formal.

Faktor kedua berkaitan dengan rendahnya upah di sektor informal. Karena keterbatasan

latar belakang pendidikan dan keterampilan, mayoritas perempuan miskin di Kabupaten Bandung terpaksa bekerja di sektor informal seperti buruh tani harian, buruh cuci, atau buruh lepas konveksi. Mereka bekerja dengan upah yang berada jauh di bawah standar regional, tanpa adanya jaminan kesehatan, kepastian kerja, maupun perlindungan hukum. Faktor ketiga adalah minimnya akses terhadap modal usaha formal. Akibat hambatan budaya patriarki yang masih kuat, kepemilikan aset berharga seperti tanah atau bangunan hampir seluruhnya atas nama laki-laki. Ketiadaan agunan properti ini membuat perempuan kesulitan mendapatkan pinjaman modal dari lembaga perbankan resmi karena dinilai tidak memenuhi syarat atau *unbankable*.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah sebenarnya menjadi urat nadi utama perekonomian di Kabupaten Bandung dan wilayah Soreang. Mayoritas pelaku usaha mikro di jalanan, pasar tradisional, dan industri rumahan adalah kaum perempuan. Pemerintah Kabupaten Bandung bersama kamar dagang dan Industri terus menggenjot program perluasan pasar, dan sebagian besar program bantuan sosial seperti kelompok usaha bersama serta stimulus dana graduasi sengaja diarahkan pada usaha mikro berbasis perempuan, seperti warung kelontong, kuliner olahan harian, konveksi skala rumahan, pengolahan herbal, dan kerajinan tangan.

Pelaksanaan di lapangan, para pelaku usaha mikro perempuan ini membentur tembok penghambat yang sangat tebal. Keterbatasan modal keuangan dan status mereka yang *unbankable* memaksa mereka terjebak ke dalam skema pinjaman informal yang eksploitatif dari bank keliling atau yang di kalangan masyarakat lokal dikenal sebagai bank emok. Selain itu, bantuan modal stimulan yang diturunkan oleh pemerintah sering kali tidak dibarengi dengan pelatihan manajemen bisnis yang sistematis dan berkelanjutan. Pelaku usaha perempuan umumnya sangat mahir dalam memproduksi barang, tetapi mereka sangat lemah dalam pembukuan keuangan, pemisahan kas rumah tangga, dan manajemen risiko bisnis sehingga usaha mereka berjalan di tempat atau rentan gulung tikar. Hambatan ini diperparah oleh digitalisasi pemasaran yang belum merata. Di area kecamatan penyangga Soreang, penguasaan teknologi digital masih berpusat pada pelaku usaha skala menengah ke atas, sementara pelaku usaha mikro KPM-PKH masih sangat bergantung pada pasar luring konvensional yang cakupannya terbatas pada lingkungan lokal tetangga sekitarnya.

Serangkaian hambatan klasik inilah yang pada akhirnya mengunci KPM-PKH dalam lingkaran bantuan sosial tanpa ujung. Mereka mengalami ketakutan psikologis yang mendalam untuk melakukan graduasi sejahtera mandiri, yaitu sebuah kondisi berakhirnya kepesertaan bantuan karena kondisi sosial ekonomi yang telah dinilai meningkat dan mandiri. Ketakutan terbesar mereka adalah kehilangan bantalan finansial tunai dari pemerintah yang selama ini menjadi kepastian bulanan, di saat usaha mikro yang mereka rintis belum memiliki stabilitas pendapatan, kepastian pasar, dan jejaring usaha yang kokoh.

Menyelesaikan kemacetan graduasi mandiri yang kronis ini, perspektif pekerjaan sosial feminis (*feminist social work*) menawarkan sebuah pisau analisis yang tajam, kritis, dan emansipatif. Menurut para ahli pekerjaan sosial makro dan feminis seperti Dominelli (2002) serta Lena Dominelli dan Ankie Hoogvelt (1996), kemiskinan yang dialami oleh perempuan bukanlah sekadar masalah kekurangan materi atau pendapatan finansial semata. Kemiskinan gender adalah akibat langsung dari penindasan struktural yang sistematis, marginalisasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan perlunya pemberdayaan kelompok perempuan itu penting, serta pengabaian yang lama terhadap potensi kekuatan tersembunyi (*the hidden power*) yang sebenarnya dimiliki oleh kaum perempuan (Hyde, 2013; Orme, 2013).

Dalam poin pertama, perspektif ini menekankan pentingnya melakukan dekonstruksi terhadap paradigma pemberdayaan tradisional. Pekerjaan sosial feminis menolak keras pendekatan bantuan sosial yang bersifat karitatif atau belas kasihan semata, serta pendekatan atas-bawah yang memosisikan perempuan hanya sebagai objek pasif penerima santunan. Pendekatan konvensional seperti itu dinilai justru memperkuat subordinasi perempuan; bantuan sering kali diberikan dengan asumsi peran domestik murni tanpa memberikan mereka kuasa penuh atas alat produksi dan keputusan ekonomi. Sebaliknya, pekerjaan sosial feminis menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran kritis. Perempuan miskin harus dibantu dan didampingi untuk menyadari bahwa kemiskinan yang mereka alami bukanlah sebuah takdir absolut atau kegagalan pribadi, melainkan hasil dari konstruksi sosial dan relasi kuasa yang

timpang di dalam masyarakat.

Poin kedua dari perspektif ini fokus pada transformasi kekuatan, yaitu mengubah potensi tersembunyi menjadi kekuatan nyata yang diakui. Konsep inti dari pekerjaan sosial feminis adalah pengorganisasian masyarakat yang berfokus pada tiga dimensi pemberdayaan yang saling terintegrasi secara simultan, yaitu dimensi personal, relasional, dan struktural atau politik. Pada dimensi personal, fokus intervensi diarahkan untuk membangun kembali kepercayaan diri perempuan dan mengikis habis mentalitas pasrah serta ketergantungan pada bantuan sosial. Pada dimensi relasional, intervensi dilakukan dengan membawa perempuan keluar dari isolasi tembok domestik rumah tangga mereka dan menyatukannya ke dalam sebuah kelompok kolektif. Di dalam kelompok ini, kaum perempuan dapat menjalani proses saling belajar dan berbagi kecakapan hidup secara terstruktur dan setara. Sementara pada dimensi struktural, intervensi bertujuan mengubah potensi tersembunyi yang selama ini berserak tak terlihat di ranah domestik menjadi kekuatan nyata di ruang publik melalui pengakuan ekonomi. Ketika usaha yang dikelola perempuan diakui keberadaannya dan menghasilkan pendapatan yang stabil, posisi tawar mereka di dalam pengambilan keputusan rumah tangga dan komunitas secara otomatis akan meningkat.

Poin ketiga yang tidak kalah krusial adalah pemahaman mengenai pentingnya pengembangan jaringan usaha atau *business networking*. Secara konseptual dalam teori pekerjaan sosial makro, kondisi ketidakberdayaan masyarakat miskin sering kali terjadi karena mereka mengalami isolasi sosial dari sistem sumber daya eksternal. Jaringan usaha adalah kunci intervensi makro yang selama ini terputus dalam pelaksanaan program KPM-PKH. Jaringan usaha yang sehat bermanfaat untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi biaya produksi, memperlancar rantai distribusi, serta membagi risiko bisnis melalui kolaborasi yang saling menguntungkan. Intervensi pekerjaan sosial feminis bertugas memfasilitasi kaum perempuan untuk mampu memetakan secara mandiri aktor-aktor berpengaruh di sekitar mereka dengan menggunakan instrumen analisis partisipatif seperti Diagram Venn. Melalui pemetaan ini, kelompok perempuan didorong untuk memberanikan diri menghubungkan usaha mikro mereka dengan sistem dukungan yang lebih luas, mulai dari lembaga permodalan formal, kamar dagang dan industri kabupaten Bandung, dinas-dinas pemerintahan terkait, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan dari sektor swasta.

Berangkat dari situasi empiris yang terjadi di Kabupaten Bandung serta dilandasi oleh kerangka teoretis pekerjaan sosial feminis tersebut, Pusat pengabdian masyarakat Poltekesos Bandung mengambil langkah konkret dengan menginisiasi penerapan Model pemberdayaani melalui kelompok usaha wanita tangguh atau KUWATAN. Model strategi ini dirancang dan dibangun bukan sekadar sebagai wadah kelompok arisan biasa atau tempat berkumpulnya ibu-ibu secara informal. KUWATAN didesain sebagai sebuah institusi lokal sekaligus wadah usaha bersama yang terorganisasi secara ketat, sistematis, dan profesional di tingkat komunitas. Model ini secara utuh mengintegrasikan aspek penguatan mentalitas wirausaha untuk menumbuhkan kesiapan psikologis lepas dari bantuan, peningkatan keterampilan manajemen bisnis praktis yang aplikatif, dan pengikatan komitmen dalam jaringan usaha kolektif.

Kehadiran Model KUWATAN diarahkan untuk mengatasi dua kendala utama di lapangan secara bersamaan dan berkesinambungan. Model ini bekerja mengikis sikap mental ketergantungan bantuan pada diri keluarga penerima manfaat, dan di waktu yang sama, mengatasi keterbatasan komitmen atau kapasitas operasional para Pendamping PKH di lapangan. KUWATAN menyediakan sebuah panduan langkah intervensi makro yang sangat aplikatif, terukur, dan berbasis pada pembagian peran yang inklusif di antara pemangku kepentingan. Melalui penerapan model inovatif ini, proses pelaksanaan graduasi mandiri tidak lagi dipandang sebagai sebuah kebijakan pemberhentian bantuan sosial yang menakutkan bagi KPM, melainkan berubah menjadi sebuah gerbang kemandirian ekonomi yang dinanti dan menjadi panggung pembuktian atas manifestasi kekuatan nyata kaum perempuan di Kabupaten Bandung.

2. METODE

Penyusunan, penerapan, dan pengujian Model strategi graduasi mandiri melalui kelompok usaha wanita tangguh (KUWATAN) ini menggunakan metode intervensi makro pekerjaan sosial (*macro social work practice*). Pendekatan utama yang diterapkan adalah pengorganisasian masyarakat (*community organization*) yang diintegrasikan secara mendalam dengan prinsip-prinsip *feminist social work*. Seluruh rangkaian program dirancang dan dilaksanakan secara partisipatif, memosisikan target sasaran sebanyak 25 KPM PKH yang didamping oleh 5 orang dosen poltekesos bandung—yaitu keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM-PKH) yang memiliki rintisan usaha serta para Pendamping sosial—bukan sekadar sebagai objek intervensi, melainkan sebagai subjek sekaligus mitra sejajar yang mengendalikan proses perubahan.

Secara metodologis, intervensi makro ini dijalankan melalui siklus pemecahan masalah (*problem-solving cycle*) yang terstruktur nulai tahap pendekatan awal Maret 2024 dan assement pada Juni 2024 rencana intevensi bulan september 2024 dan kemudian pelaksanaan intevensi pada bulan oktober 2024. Proses pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dibagi ke dalam enam tahapan makro pekerjaan sosial yang berjalan secara simultan dan berkelanjutan.

2.1. Persiapan Sosial dan Pengorganisasian Masyarakat

Tahap awal 20 Maret 2024 dalam metode intervensi makro ini difokuskan pada persiapan sosial yang berlangsung secara intensif selama satu hari. Tujuan utama dari tahapan ini adalah untuk mengamankan dukungan birokrasi, membangun legitimasi hukum, serta menumbuhkan komitmen kerja sama dari otoritas lokal di Kabupaten Bandung. Proses ini melibatkan koordinasi taktis dengan koordinator lapangan PKH tingkat kabupaten, jajaran Pendamping sosial PKH, serta pejabat struktural di lingkungan Dinas sosial Kabupaten Bandung. Komunikasi dibangun secara bauran melalui pemanfaatan media digital seperti telepon dan aplikasi pesan singkat, yang kemudian diperkuat dengan kunjungan dinas langsung ke kantor dinas terkait.

Bersamaan dengan persiapan sosial tersebut, dilakukan langkah pengorganisasian masyarakat untuk memetakan dua aktor kunci. Aktor pertama adalah kelompok kepentingan (*interest group*), yaitu institusi lokal, sektor swasta, dan elemen masyarakat yang memiliki ketertarikan serta sumber daya untuk mendukung kemandirian ekonomi KPM. Aktor kedua adalah kelompok sasaran (*target group*), yang berfokus pada identifikasi spesifik terhadap KPM-PKH yang telah memiliki embrio usaha dan dinilai memiliki potensi sosiologis untuk didorong menuju graduasi mandiri sejahtera.

2.2. Membangun Relasi (*Team Building*)

Tahapan kedua 25 Maret 2024 adalah membangun relasi sosial yang dialokasikan selama satu hari. Dalam perspektif pekerjaan sosial feminis, tahapan ini merupakan instrumen krusial untuk menumbuhkan rasa saling percaya (*trust building*) serta meruntuhkan resistensi psikologis yang kerap muncul di lingkungan masyarakat penerima bantuan. Tim pengabdi dari Pusat Pengabdian Masyarakat (PPM) Poltekesos Bandung memosisikan diri sebagai fasilitator yang setara dengan KPM-PKH dan Pendamping Sosial.

Aktivitas pada tahap ini diarahkan untuk menyamakan persepsi, menyatukan visi, dan membangun pemahaman bersama mengenai esensi kemandirian ekonomi. Melalui dialog personal yang emansipatif, KPM-PKH dimotivasi untuk melihat bahwa melepaskan diri dari ketergantungan bantuan sosial bukanlah sebuah ancaman finansial, melainkan sebuah peluang strategis untuk mencapai kesejahteraan keluarga yang lebih bermartabat dan mandiri.

2.3. Asesmen Masalah dan Kebutuhan Partisipatif

Proses asesmen 27 Juni 2024 dilakukan secara partisipatif selama satu setengah hari dengan mengombinasikan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan pertemuan warga (*community meeting*). Penilaian masalah tidak didasarkan pada sudut pandang luar, melainkan digali langsung dari perspektif subjektif kaum perempuan KPM-PKH. Hasil asesmen secara deskriptif memetakan dua dimensi utama, yaitu dimensi kebutuhan dan dimensi kekuatan

atau aset yang dimiliki komunitas.

Pada dimensi kebutuhan, para perempuan mengekspresikan perlunya peningkatan pendapatan keluarga yang mendesak guna mengimbangi laju inflasi pemenuhan kebutuhan harian. Mereka juga mengidentifikasi kebutuhan akan pengembangan variasi usaha agar komoditas yang mereka jual tidak monoton dan mampu bersaing di pasar lokal. Sementara pada dimensi kekuatan atau aset, ditemukan fakta bahwa sebagian besar KPM telah memiliki rintisan usaha mandiri yang berjalan secara informal di rumah mereka. Lebih dari itu, mereka memiliki modal manusia berupa karakter psikologis sebagai pekerja keras, ulet, memiliki daya juang yang tinggi, serta ikatan solidaritas sosial antarperempuan yang sangat kuat di tingkat lokal.

2.4. Penyusunan Rencana Intervensi

Proses rencana intervensi 29 September 2024 Berangkat dari hasil pemetaan aset dan kebutuhan tersebut, tim pengabdi bersama kelompok sasaran menyelenggarakan musyawarah mufakat untuk merumuskan rencana aksi. Berdasarkan keputusan bersama, disepakati sebuah program intervensi yang diberi nama "pembuatan wadah usaha bersama". Tujuan makro dari program ini adalah mengonversi usaha individual yang terisolasi menjadi usaha kelompok yang solid demi mempercepat graduasi mandiri melalui perluasan jejaring usaha, peningkatan pendapatan, dan penguatan kerja sama kolektif.

Langkah-langkah taktis yang disusun secara kronologis meliputi perencanaan dan persiapan modal bersama, pemilihan lokasi usaha bersama yang strategis di wilayah Soreang, serta pelaksanaan pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan pembuatan produk makanan olahan. Selanjutnya, rencana intervensi juga merancang kurikulum praktis pengelolaan bisnis, penyusunan strategi pemasaran bauran baik secara daring melalui media sosial maupun luring ke pasar tradisional, penjalinan kemitraan dengan sistem sumber eksternal, hingga penyusunan mekanisme evaluasi usaha secara berkala.

2.5. Pelaksanaan Intervensi dan Validasi Model

Tahap pelaksanaan intervensi 1- 5 Oktober difokuskan secara penuh pada dua pilar program inti yang berjalan secara paralel. Pilar pertama adalah pelembagaan lokal melalui pembentukan kelompok usaha wanita tangguh atau KUWATAN. Pembentukan lembaga lokal ini bertujuan menciptakan ruang belajar bersama yang aman dan setara bagi kaum perempuan guna mentransfer pengetahuan dan keterampilan bisnis secara internal.

Pilar kedua adalah pelaksanaan penguatan kapasitas (*capacity building*) yang berfokus pada penguasaan teknik pemetaan sumber daya dan pengembangan jaringan usaha (*business networking*). Dalam sesi ini, KPM-PKH dibekali kemampuan praktis untuk menggunakan alat analisis instrumen partisipatif diagram venn, sehingga mereka secara mandiri mampu mengidentifikasi, menghubungkan, dan menegosiasikan kepentingan usaha kelompok mereka dengan para pemangku kepentingan eksternal, baik dari sektor perbankan, dinas pemerintah, maupun dunia industri swasta. Rangkaian metode intervensi makro ini diakhiri dengan proses validasi model melalui evaluasi dampak partisipatif guna menguji efektivitas, keberterimaan, dan tingkat keberlanjutan model di Kabupaten Bandung

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi model strategi graduasi mandiri melalui kelompok usaha wanita tangguh (KUWATAN) di Kabupaten Bandung telah memberikan kontribusi nyata yang signifikan, baik dalam tataran output prosedural pekerjaan sosial maupun dalam dimensi transformasi sosial-ekonomi bagi para penerima manfaat. Melalui intervensi makro yang menekankan pada aspek pengorganisasian komunitas, pengabdian masyarakat ini tidak sekadar berfokus pada hasil fisik sektoral, melainkan menyentuh akar persoalan struktural dan kultural yang selama ini mengunci keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM-PKH) dalam lingkaran ketergantungan bantuan sosial. Hasil intervensi dan analisis pembahasan diuraikan ke dalam beberapa klaster capaian teoretis dan praktis di bawah ini.

3.1. Terbentuknya Kelembagaan KUWATAN

Output utama dari pelaksanaan intervensi makro ini adalah keberhasilan mengonsolidasikan potensi-potensi individual para perempuan KPM-PKH yang semula berserak dan terisolasi menjadi sebuah wadah usaha bersama yang solid di tingkat komunitas. Lembaga kolektif ini disepakati bersama oleh warga dengan nama kelompok usaha wanita tangguh atau KUWATAN. Kehadiran KUWATAN berhasil mendobrak sekat sosiologis yang selama ini mengurung perempuan miskin di dalam wilayah domestik rumah tangga mereka. Kelompok ini bertransformasi menjadi sebuah institusi lokal yang menginternalisasi lima nilai dasar dalam kehidupan anggotanya, yaitu nilai saling percaya, kompak, peduli, saling mendukung, dan kejujuran. Guna memelihara motivasi, merawat daya juang, serta menjaga kohesi sosial kelompok agar tetap dinamis di tengah himpitan beban ekonomi, dirumuskan sebuah yel penyemangat yang berbunyi: KUWATAN is the best! Yes, yes, yes!.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan usaha bersama, kelompok KUWATAN berhasil menyusun rencana kerja taktis jangka pendek dan jangka menengah yang berorientasi pada pasar. Rencana kerja ini di antaranya meliputi pelaksanaan studi tiru ke pelaku usaha kecil lain yang manajemennya sudah lebih maju di wilayah Soreang. Selain itu, kelompok berkomitmen kuat untuk melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas higienitas pelayanan produk kuliner olahan mereka guna menjamin kepuasan konsumen. Eksperimentasi rasa produk juga dijalankan secara berkala agar komoditas yang mereka hasilkan memiliki keunikan rasa, lebih kompetitif, dan mampu bersaing di pasar lokal. Rencana kerja jangka menengah kelompok dikokohkan melalui penyelenggaraan pertemuan rutin bulanan sebagai forum rekonsiliasi keuangan, penambahan variasi jenis jualan agar tidak monoton, perluasan promosi ke jaringan komunitas yang lebih luas, serta inisiasi digitalisasi pemasaran untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih modern.

3.2. Penguatan Pengetahuan Jaringan Usaha Melalui Diagram Venn

Salah satu kebaruan operasional dalam model KUWATAN ini adalah pembekalan kemampuan analisis makro bagi para pelaku usaha mikro perempuan melalui pemanfaatan instrumen partisipatif Diagram Venn. Dalam perspektif pekerjaan sosial makro, ketidakberdayaan masyarakat miskin sering kali disebabkan oleh keterpencilan mereka dari sistem sumber daya lingkungan. Melalui simulasi Diagram Venn yang difasilitasi oleh tim pengabdi bersama Pendamping Sosial PKH, para perempuan KPM-PKH diberikan keterampilan praktis untuk memetakan secara kritis aktor-aktor yang memiliki pengaruh serta dampak langsung terhadap ekosistem bisnis mereka.

Melalui analisis instrumen ini, KPM-PKH didorong untuk mengidentifikasi seluruh potensi dan sumber daya internal yang ada di dalam komunitas mereka, untuk kemudian dihubungkan secara strategis dengan lingkungan makro atau eksternal yang berada di luar komunitas. Dalam pemetaan jaringan usaha tersebut, Kelompok KUWATAN yang beranggotakan KPM-PKH dan didampingi secara melekat oleh Pendamping Sosial diposisikan sebagai poros utama pergerakan ekonomi. Kelompok ini kemudian berhasil membangun hubungan timbal balik dan aksesibilitas dengan Dinas Sosial Kabupaten Bandung selaku pemegang otoritas kebijakan lokal, serta dengan pihak akademisi dari Poltekesos Bandung sebagai lembaga pembina yang memberikan supervisi keilmuan secara berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, kelompok KUWATAN berhasil menembus dan menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta skala nasional, yaitu melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dari PT Indofood atau produsen mie instan Indomie, yang memberikan dukungan penguatan bahan baku dan sarana usaha. Sebagai ujung tombak perputaran ekonomi, kelompok mengintegrasikan sistem pemasaran bauran yang saling terhubung, di mana produk olahan makanan dipasarkan secara konvensional melalui pasar luring di lingkungan sekitar Soreang, sekaligus dipromosikan secara luas melalui media sosial atau platform daring guna mempercepat akumulasi keuntungan modal kelompok.

3.3. Analisis Dampak, Inovasi, dan Faktor Keberhasilan

Berdasarkan hasil validasi mendalam melalui teknik wawancara terstruktur dan diskusi

terfokus dengan pihak Dinas Sosial, Pendamping Sosial, dan Koordinator Lapangan PKH Kabupaten Bandung, disimpulkan bahwa model intervensi makro ini memberikan dampak nyata dan melahirkan kebaruan dalam praktik pekerjaan sosial di lapangan. Dari dimensi dampak riil, KPM-PKH kini tidak lagi berjalan sendiri-sendiri melainkan telah memiliki ruang belajar atau *learning space* yang terstruktur di tingkat desa. Mereka terbukti mampu menjalankan manajemen usaha kolektif secara profesional, serta sukses mengakses sistem sumber daya yang jauh lebih luas dari sebelum adanya intervensi, sehingga omzet pendapatan usaha kelompok merangkak naik secara konsisten.

Jika dibedah dari unsur inovasi, model ini memfasilitasi terjadinya proses *learning each other* atau saling mentransfer ilmu, pengetahuan, dan keterampilan praktis secara terstruktur antar-anggota kelompok, di mana yang terampil mengajari yang awam dan yang melek teknologi mengajari yang gagap teknologi. Secara teoretis dalam kerangka *feminist social work*, kelompok ini membawa kebaruan struktural karena berhasil mengubah posisi sosial kaum perempuan dari kondisi *the hidden power* atau kekuatan ekonomi tersembunyi yang selama ini tidak diperhitungkan dalam statistik keluarga dan negara, menjadi *the visible power*, yaitu sebuah kekuatan ekonomi baru yang nyata, mandiri, dan diakui secara luas di ruang publik.

Keberhasilan gerakan pemberdayaan ekonomi berbasis jender ini tidak lepas dari adanya faktor sukses utama, yaitu kuatnya kolaborasi multipihak atau *support system* yang sangat solid di sekitar kelompok. Gerakan ini didorong secara simultan oleh komitmen kebijakan dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung, pendampingan melekat dari Pendamping Sosial di lapangan, fasilitasi keilmuan dan metodologi dari Poltekesos Bandung, serta keterlibatan nyata sektor swasta melalui pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* dari perusahaan mie instan Indomie yang menjamin stabilitas pasokan produksi kelompok dengan bantuan berupa bahan baku usaha sebanyak 100 dos indomie kemasan dengan berbagai macam variasi rasa dan sebanyak 25 gerobak usaha warmindo.

3.4. Kendala Lapangan

Meskipun model intervensi makro ini memberikan dampak sosiologis dan ekonomis yang sangat positif bagi sebagian besar anggota, tim pengabdi bersama para pemangku kepentingan tetap mengidentifikasi adanya dua kendala utama yang membentur pelaksanaan program di lapangan. Kendala pertama yang menjadi tantangan terberat adalah masih kuatnya sikap mental ketergantungan bantuan sosial di kalangan masyarakat miskin. Ditemukan adanya hambatan psikologis atau *mental block* pada sebagian kecil anggota kelompok yang dilingkupi rasa khawatir yang mendalam. Mereka cemas jika usaha bersama KUWATAN ini terlihat terlalu maju, berkembang, dan sukses, maka pemerintah daerah secara sepihak akan langsung menghentikan bantuan sosial PKH dan jaring pengaman lainnya, sebelum pondasi ekonomi keluarga mereka benar-benar stabil dan mandiri.

Kendala lapangan kedua berkaitan dengan dimensi pembinaan, yaitu adanya variasi tingkat komitmen dan tingginya beban kerja yang harus ditanggung oleh para Pendamping Sosial PKH di tingkat lokal. Sebagian pendamping di lapangan dihadapkan pada kewajiban penyelesaian tugas-tugas administratif bulanan dari kementerian yang terlampau menyita waktu. Keterbatasan waktu dan energi inilah yang terkadang menghambat intensitas pengawasan, kedalaman supervisi, serta keberlanjutan pengawalan jalannya model KUWATAN secara optimal di tingkat akar rumput.

3.5. Pelajaran yang Dipetik (*Lessons Learned*) dan Keberlanjutan

Rangkaian proses pengabdian masyarakat melalui penerapan model KUWATAN ini memberikan pelajaran berharga bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial makro di Indonesia. Pembentukan kelembagaan usaha bersama seperti KUWATAN terbukti secara signifikan mampu mendongkrak harga diri, martabat, dan kepercayaan diri (*self-esteem*) kaum perempuan miskin. Ketika perempuan diberikan ruang untuk memimpin, mengelola keuangan, dan mengambil keputusan strategis dalam bisnis kelompok, mentalitas pasrah mereka perlahan terkikis. Peningkatan kapasitas ekonomi dan penguatan kapasitas sosial di ranah publik ini secaralangsung berimplikasi positif terhadap meningkatnya posisi tawar atau *bargaining position*

kaum perempuan di dalam dinamika pengambilan keputusan domestik rumah tangga, sehingga relasi kuasa antara suami dan istri menjadi lebih setara dan harmonis.

Untuk menjamin keberlanjutan program agar tidak berhenti saat tim pengabdi ditarik, langkah strategis kelembagaan telah diambil. Dinas Sosial Kabupaten Bandung secara resmi telah memberikan pengakuan legal terhadap eksistensi kelembagaan Kelompok KUWATAN. Otoritas pemerintah daerah tersebut telah menyatakan komitmennya untuk mengintegrasikan kelompok usaha ini ke dalam program pendampingan sosial intensif dinas, yang dalam pelaksanaannya akan terus berserikat dan bersinergi dengan program laboratorium pengabdian masyarakat Poltekesos Bandung. Kolaborasi jangka panjang ini diharapkan dapat memastikan KUWATAN tetap berjalan mandiri, produktif, dan menjadi katalisator utama dalam mempercepat angka graduasi mandiri sejahtera di Kabupaten Bandung.

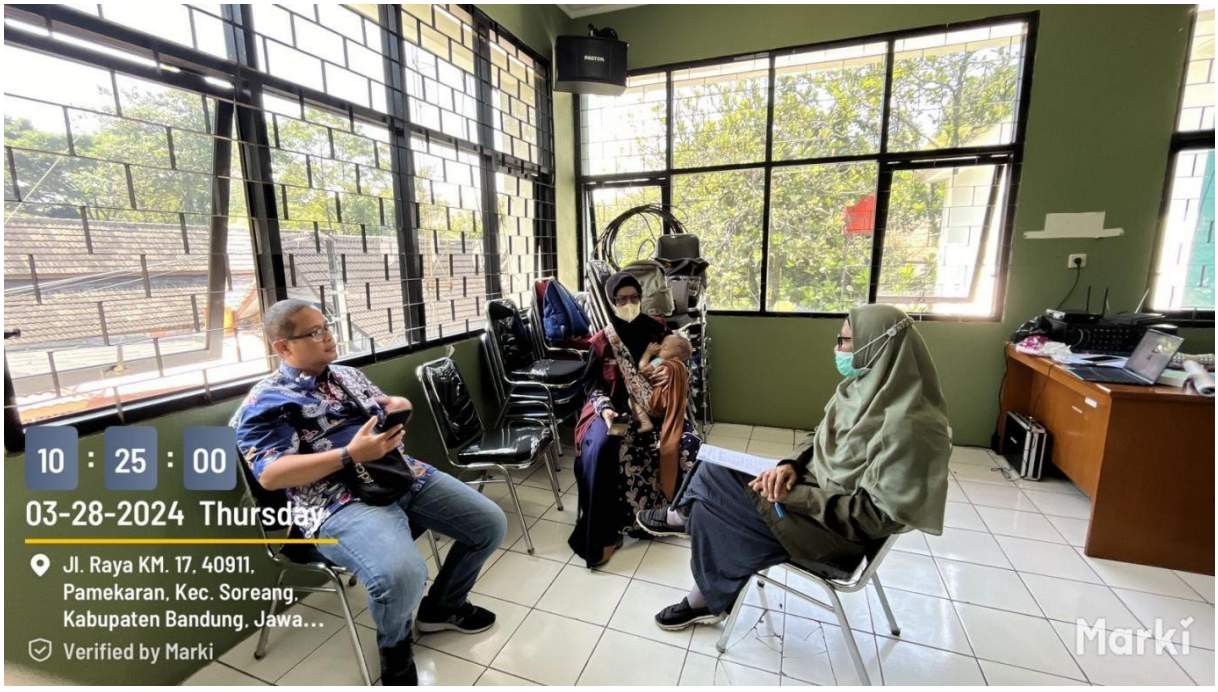
3.6. Lampiran



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan

4. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Penerapan Model Strategi Graduasi Mandiri melalui Kelompok Usaha Wanita Tangguh (KUWATAN) di Kabupaten Bandung merupakan sebuah inovasi teoretis sekaligus terobosan praktis-taktis yang sangat krusial dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan ekstrem struktural, khususnya pada kelompok perempuan rawan sosial ekonomi. Melalui pendekatan pengorganisasian masyarakat yang berbasis pada keadilan jender, model intervensi makro pekerjaan sosial ini berhasil mengonsolidasikan kapasitas individual Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) yang semula terisolasi menjadi sebuah kekuatan ekonomi kolektif yang solid, tangguh, dan melembaga di tingkat akar rumput.

Kehadiran KUWATAN terbukti efektif sebagai media pengubah perilaku sosial masyarakat miskin. Wadah ini mampu meruntuhkan hambatan psikologis berupa kecemasan sosial dan mengikis mentalitas ketergantungan pada bantuan sosial pemerintah (*welfare dependency*), untuk kemudian diubah menjadi kesiapan psikologis dan motivasi yang kuat menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Ditinjau dari perspektif pekerjaan sosial feminis, model ini memberikan kontribusi mendalam pada proses transformasi eksistensial kaum perempuan penerima manfaat, yaitu dari kondisi kekuatan yang tersembunyi (*the hidden power*) menjadi kekuatan ekonomi yang nampak, produktif, dan diakui secara nyata di ruang publik (*the visible power*). Dampak berantai dari transformasi ini tidak hanya memicu kenaikan omzet pendapatan usaha kelompok, melainkan juga mendongkrak harga diri, menumbuhkan martabat sosial, serta meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) perempuan dalam sistem pengambilan keputusan di tingkat domestik rumah tangga maupun di tingkat komunitas.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan keberhasilan implementasi, dampak riil yang dihasilkan, serta evaluasi

komprehensif terhadap jalannya program di lapangan, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis yang ditujukan kepada para pemangku kebijakan guna menjamin keberlanjutan dan perluasan kemanfaatan model intervensi ini.

Rekomendasi pertama ditujukan secara makro kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama dengan Dinas Sosial di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Otoritas pembuat kebijakan jaminan sosial ini direkomendasikan untuk mengadopsi prinsip-prinsip operasional model KUWATAN sebagai salah satu rujukan regulasi nasional atau diformulasikan ke dalam bentuk Petunjuk Teknis (Juknis) resmi bagi seluruh Pendamping Sosial PKH di Indonesia. Kehadiran petunjuk teknis yang terstruktur sangat mendesak untuk memberikan panduan langkah yang aplikatif bagi pendamping dalam melakukan intervensi makro di lapangan, sehingga proses graduasi sejahtera mandiri tidak lagi dijalankan secara konvensional-administratif melainkan berbasis pada penguatan kapasitas kelembagaan lokal dan perluasan jaringan usaha yang matang. Di samping itu, kementerian dan dinas terkait perlu merumuskan skema mitigasi berupa kebijakan sabuk pengaman masa transisi (*buffer period*), di mana KPM yang usahanya mulai maju tidak langsung diputus bantuannya seketika, melainkan diberikan pendampingan bisnis lanjutan selama periode tertentu guna memastikan usaha mereka benar-benar mandiri secara permanen.

Rekomendasi kedua berkaitan dengan aspek replikasi, diseminasi, dan keberlanjutan model. Model Strategi Graduasi Mandiri berbasis KUWATAN ini sangat direkomendasikan untuk direplikasi secara masif di berbagai kabupaten dan kota lainnya, baik di wilayah Provinsi Jawa Barat maupun di seluruh wilayah Indonesia. Langkah replikasi ini memiliki tingkat kelayakan dan keberhasilan yang sangat tinggi mengingat karakteristik sosial, budaya, ekonomi, serta problem ketergantungan bantuan pada sebagian besar KPM-PKH di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan indikator sosiologis yang relatif homogen.

Strategi pengorganisasian kelompok yang mengintegrasikan penguatan mentalitas wirausaha, pelatihan manajemen bisnis praktis, dan pemetaan jaringan usaha menggunakan instrumen Diagram Venn memiliki fleksibilitas adaptasi yang tinggi untuk diterapkan di wilayah rural maupun urban. Namun demikian, keberhasilan replikasi model ini di daerah lain mensyaratkan satu faktor kunci yang tidak boleh diabaikan, yaitu adanya komitmen yang tinggi, peningkatan kompetensi intervensi makro, serta penyesuaian beban kerja administratif dari para Pendamping Sosial PKH selaku fasilitator utama di tingkat lokal. Penguatan kapasitas pendamping secara berkelanjutan melalui pelatihan pekerjaan sosial makro menjadi investasi krusial agar model KUWATAN dapat diimplementasikan secara konsisten dan menjadi motor penggerak utama pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan perempuan di tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2023). *Statistik kesejahteraan rakyat Provinsi Jawa Barat 2023*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2024). *Provinsi Jawa Barat dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2025). *Indikator kesejahteraan rakyat Provinsi Jawa Barat 2025*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Dinas Sosial Kabupaten Bandung. (2023). *Data perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) Kabupaten Bandung tahun 2023*. Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

Dinas Sosial Kabupaten Bandung. (2024). *Rekapitulasi data terpadu kesejahteraan sosial dan graduasi program keluarga harapan (PKH) Kabupaten Bandung tahun 2024*. Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

Dominelli, L. (2002). *Feminist social work theory and practice*. New York: Pearson Education.

Dominelli, L., & Hoogvelt, A. (1996). Globalisation and the marginalisation of women in the new world order. *Critical Social Policy*, *16*(46), 49–66.New York: Pearson Education.

Dubois, B., & Miley, K. K. (2005). *Social work: An empowering profession* (5th ed.). New York : Pearson Education.

Hery. (2019). *Manajemen bisnis dan strategi*. Jakarta: Salemba Empat.

Homan, M. S. (2008). *Promoting community change: Making it happen in the real world*. New York : Thomson Brooks Cole.

Hyde, C. A. (2013). *Feminist social work practice: Clinical and social perspectives*. New York: Columbia University Press.

Ife, J. (2002). *Community development: Creating community alternative vision analysis and practice*. New York : Longman.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Netting, F. E., Kettner, P. M., & McMurtry, S. L. (2004). *Social work macro practice*. New York: Pearson Education.

Orme, J. (2001). *Gender and social work*. New York: Routledge & Kegan Paul.

Orme, J. (2013). *Feminist social work*. New York: Palgrave Macmillan.

Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung. (2024). *Laporan riset pekerjaan sosial makro dan pengabdian masyarakat: Model pemberdayaan kelompok usaha wanita tangguh (KUWATAN)*. Pusat Pengabdian Masyarakat (PPM) Poltekesos Bandung.

Rustanto, B. (2014). *Penelitian kualitatif pekerjaan sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rustanto, B. (2015). *Menangani kemiskinan: Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suharto, E. (2006). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Tropman, J. E. (Ed.). (1995). *Tactics and techniques of community intervention* (3rd ed.). New York: Routledge & Kegan Paul.

Walton, G. R. (1975). *Women in social work*. New York: Routledge & Kegan Paul.